

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Kondisi Ketahanan Pangan Kecamatan Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan

1. Indikator Rasio Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealialia per kapita per hari merupakan petunjuk kecukupan pangan dalam suatu wilayah. Konsumsi normatif didefinisikan sebagai jumlah pangan serealialia dan umbi-umbian yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi. Konsumsi pangan Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealialia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.000 kkal dan untuk mencapai kebutuhan kalori dari serealialia dan umbi-umbian maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram serealialia per hari. Komoditas serealialia dan umbi-umbian yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Ketahanan pangan (*food security*) berfokus pada keseimbangan antara populasi dan ketersediaan pangan. Untuk menjaga keseimbangan ini, tingkat pertumbuhan ketersediaan pangan tidak boleh lebih rendah dari tingkat pertumbuhan populasi (Burchi & De Muro, 2016).

Tabel 1. Produksi sereal dan umbi-umbian, nilai rasio konsumsi normatif menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Produksi sereal dan umbi-umbian (Ton)	Rasio Konsumsi Normatif
1	Bambanglipuro	20.054	0,003
2	Banguntapan	15.808	0,001
3	Bantul	15.125	0,002
4	Dlingo	34.708	0,002
5	Imogiri	16.129	0,003
6	Jetis	23.531	0,002
7	Kasihan	9.996	0,002
8	Kretek	11.948	0,007
9	Pajangan	6.232	0,009
10	Pandak	19.131	0,003
11	Piyungan	21.242	0,002
12	Pleret	13.655	0,000
13	Pundong	17.125	0,004
14	Sanden	18.631	0,004
15	Sedayu	18.107	0,003
16	Sewon	16.673	0,001
17	Srandakan	6.230	0,013

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bantul dan hasil olah data, 2017.

Rasio konsumsi normatif merupakan jumlah pangan sereal dan umbi-umbian yang harus dikonsumsi oleh individu per hari untuk memperoleh kilo kalori energi. Dalam menghitung nilai rasio konsumsi normatif dibutuhkan data jumlah produksi sereal dan umbi-umbian juga data jumlah penduduk yang terlampir pada Lampiran 1.

Setelah selesai menghitung nilai rasio konsumsi normatif per kecamatan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai indeks berdasarkan indikator rasio konsumsi normatif menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Hasil perhitungan indeks seperti terlihat pada tabel 11.

Tabel 2. Nilai indeks rasio konsumsi normatif menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,22	Tahan
2	Banguntapan	0,06	Sangat Tahan
3	Bantul	0,17	Tahan
4	Dlingo	0,14	Sangat Tahan
5	Imogiri	0,17	Tahan
6	Jetis	0,12	Sangat Tahan
7	Kasih	0,12	Sangat Tahan
8	Kretek	0,50	Agak Rawan
9	Pajangan	0,68	Rawan
10	Pandak	0,17	Tahan
11	Piyungan	0,13	Sangat Tahan
12	Pleret	0,00	Sangat Tahan
13	Pundong	0,31	Tahan
14	Sanden	0,31	Tahan
15	Sedayu	0,20	Tahan
16	Sewon	0,07	Sangat Tahan
17	Srandakan	1,00	Sangat Rawan

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 11 menunjukkan nilai indeks indikator rasio konsumsi normatif menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Pengukuran indeks didasarkan pada Panduan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan (FSVA) yang dikeluarkan oleh Dewan Ketahanan Pangan tahun 2009. Nilai indeks berkisar antar 0-1 dari kriteria sangat tahan pangan sampai sangat rawan pangan.

Tabel 3. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator rasio konsumsi normatif

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	1	5,88
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	1	5,88
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	1	5,88
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	0	0,00
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	7	41,18
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	7	41,18
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Berdasarkan tabel 12, sebaran kriteria untuk indikator rasio konsumsi normatif menunjukkan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul termasuk kategori tahan pangan dan sangat tahan pangan.

Sebanyak 7 kecamatan termasuk kategori sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Sewon. Hal ini dapat diartikan bahwa ketujuh kecamatan tersebut dapat menyediakan ketersediaan pangan serealialia untuk penduduk wilayahnya dengan sangat baik. Tingkat prioritas ketahanan pangan wilayah ada pada tingkat 6. Penduduk wilayah kecamatan tersebut masing-masing dapat terpenuhi kebutuhan pangan serealialianya oleh produksi wilayah kecamatannya.

Sebanyak 7 kecamatan termasuk kriteria tahan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Sedayu. Hal ini dapat diartikan bahwa ketujuh kecamatan tersebut dapat menyediakan ketersediaan pangan serealialia untuk penduduk wilayahnya dengan baik. Tingkat prioritas ketahanan pangan wilayah ada pada tingkat 5. Penduduk wilayah kecamatan tersebut masing-masing dapat terpenuhi kebutuhan pangan serealialianya oleh produksi wilayah kecamatannya.

Sebanyak 1 kecamatan termasuk kriteria agak rawan pangan yaitu Kecamatan Kretek. Kecamatan ini termasuk ke dalam kriteria prioritas tingkat 3. Hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan tersebut dalam keadaan cukup sulit untuk menyediakan kebutuhan pangan serealialia untuk penduduk wilayahnya dari sisi produksi.

Sebanyak 1 kecamatan termasuk kriteria rawan pangan yaitu Kecamatan Pajangan. Kecamatan ini termasuk ke dalam kriteria prioritas tingkat 2. Hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan tersebut dalam keadaan sulit untuk menyediakan kebutuhan pangan serealialia untuk penduduk wilayahnya dari sisi produksi.

Sebanyak 1 kecamatan termasuk kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Srandakan. Kecamatan ini termasuk ke dalam kriteria prioritas tingkat 1. Hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan tersebut dalam keadaan sangat sulit untuk menyediakan kebutuhan pangan serealialia untuk penduduk wilayahnya dari sisi produksi.

Secara keseluruhan dengan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Bantul dilihat dari indikator rasio konsumsi normatif berada pada kondisi baik, artinya sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul bisa menyediakan ketersediaan pangan bagi warganya dari produksi domestik.

2. Indikator Kepala Keluarga (KK) Miskin

Kemiskinan masih menjadi masalah yang kerap dihadapi suatu wilayah bahkan lingkup besar seperti negara. Dalam mewujudkan kondisi tahan pangan masalah kemiskinan merupakan hal yang membutuhkan penanganan khusus. Penduduk yang mengalami kemiskinan memiliki peluang besar mengalami kesulitan atau kendala dalam pemenuhan kebutuhannya. Kemiskinan dekat dengan tingkat daya beli yang rendah yang bisa diakibatkan oleh berbagai hal seperti salah satunya pendapatan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar didefinisikan menjadi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Persentase penduduk miskin di suatu wilayah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan wilayah tersebut. Meski dari sisi ketersediaan wilayah

mencukupi, namun tidak bisa menjamin bahwa seluruh penduduk di daerah tersebut bisa mengakses kebutuhan pangannya. Hal ini karena kemampuan penduduk dalam mengakses pangan dipengaruhi oleh daya beli penduduk itu sendiri.

Tabel 4. Persentase kepala keluarga (KK) miskin menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah KK miskin	Jumlah KK	KK miskin (%)
1	Bambanglipuro	5.956	14.632	15,46
2	Banguntapan	6.413	34.899	4,50
3	Bantul	5.518	21.741	8,73
4	Dlingo	5.557	13.097	15,10
5	Imogiri	6.883	21.460	11,72
6	Jetis	6.334	19.769	11,50
7	Kasihan	6.935	32.810	5,45
8	Kretek	3.860	10.976	12,68
9	Pajangan	5.444	11.303	15,17
10	Pandak	7.691	17.624	15,57
11	Piyungan	5.244	17.040	9,48
12	Pleret	5.319	15.584	1,13
13	Pundong	5.311	12.294	16,32
14	Sanden	4.497	11.298	14,86
15	Sedayu	4.671	15.568	9,88
16	Sewon	7.371	32.434	6,37
17	Srandakan	4.201	10.724	14,32

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul diolah, 2017.

Data yang digunakan dalam indikator kepala keluarga (KK) miskin adalah jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat menerima bantuan sosial pangan di suatu kecamatan. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Dilihat dari perspektif ketahanan pangan indikator kepala keluarga (KK) miskin mempunyai tingkat kemampuan yang tergolong kecil dalam mengakses pangan secara maksimal dikarenakan keterbatasan ekonomi. Hubungan keterkaitan antara indikator kepala keluarga (KK) miskin dengan indikator lain diantaranya: indikator pengangguran dan indikator rumah tangga berdingding bambu. Hal ini dikarenakan

kemiskinan bisa diakibatkan oleh individu yang tidak bekerja atau menganggur sehingga kemampuan daya beli rendah dan hal ini memungkinkan tercermin dari kondisi rumah individu tersebut.

Indikator kepala keluarga (KK) miskin juga berkaitan dengan indikator lain seperti indikator penduduk >15 tahun yang tidak tamat SD dan indikator balita gizi buruk. Hal ini dikarenakan penduduk usia >15 tahun yang tidak tamat SD berpeluang besar mengalami kendala dalam akses kegiatan mata pencaharian yang bisa mengakibatkan rendahnya daya beli. Kemampuan atau daya beli yang rendah bisa mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan gizi yang baik seimbang yang bisa tercermin dari status gizi balita.

Tabel 5. Nilai indeks indikator kepala keluarga (KK) miskin menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,94	Sangat Rawan
2	Banguntapan	0,22	Tahan
3	Bantul	0,50	Agak Rawan
4	Dlingo	0,92	Sangat Rawan
5	Imogiri	0,70	Rawan
6	Jetis	0,68	Rawan
7	Kasihani	0,28	Tahan
8	Kretek	0,76	Rawan
9	Pajangan	0,92	Sangat Rawan
10	Pandak	0,95	Sangat Rawan
11	Piyungan	0,55	Agak Rawan
12	Pleret	0,00	Sangat Tahan
13	Pundong	1,00	Sangat Rawan
14	Sanden	0,90	Sangat Rawan
15	Sedayu	0,58	Agak Rawan
16	Sewon	0,35	Cukup Tahan
17	Srandakan	0,87	Sangat Rawan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 14 ditunjukkan besar nilai indeks berdasarkan indikator kepala keluarga (KK) miskin menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai indeks adalah 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan

tersebut dalam kondisi sangat tahan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut dalam kondisi sangat rawan pangan berdasarkan indikator kepala keluarga (KK) miskin. Banyaknya persentase dan sebaran kriteria berdasarkan indikator ini adakan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator kepala keluarga (KK) miskin.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	7	41,18
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	3	17,65
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	3	17,65
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	1	5,88
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	2	11,76
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	1	5,88
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 15 menunjukkan sebaran kriteria kecamatan di Kabupaten Bantul menurut indikator kepala keluarga (KK) miskin. Penggolongan penduduk miskin yang digunakan adalah jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat menerima bantuan sosial pangan. Hasil olah data menunjukkan di Kabupaten Bantul terdapat 7 kecamatan atau hampir 50% kecamatan di Kabupaten Bantul yang tergolong sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan. 3 kecamatan yang termasuk rawan pangan yaitu Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kretek. 3 kecamatan yang termasuk agak rawan yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu. 1 kecamatan tergolong cukup tahan yaitu Kecamatan Sewon. 2 kecamatan tergolong tahan pangan yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Kasihan. 1 kecamatan tergolong sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Pleret.

3. Indikator Pengangguran

Penduduk tidak bekerja (pengangguran) adalah jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Tingkat pengangguran dapat dikaitkan dengan kemampuan atau daya beli suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya yang terkait pula dengan kemiskinan. Individu yang sedang menganggur tentunya memperoleh sedikit atau bahkan tidak memperoleh pendapatan. Pendapatan rendah akan mengakibatkan rendahnya daya beli sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Pengangguran dapat menjadi penyebab rendahnya kemampuan atau daya beli suatu masyarakat sehingga masyarakat mengalami kendala dalam proses mengakses kebutuhan pangannya.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tercatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2017 sebesar 11.563 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2017 tercatat sebanyak 2.650 jiwa. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Tabel 7. Persentase jumlah pengangguran per angkatan kerja menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Pengangguran (%)
1	Bambanglipuro	768	27.041	2,84
2	Banguntapan	1.942	62.463	3,11
3	Bantul	1.401	38.792	3,61
4	Dlingo	165	27.640	0,60
5	Imogiri	532	40.741	1,31
6	Jetis	710	35.639	1,99
7	Kasih	1.555	61.724	2,52
8	Kretek	581	20.439	2,84
9	Pajangan	246	22.210	1,11
10	Pandak	635	32.830	1,93
11	Piyungan	745	31.274	2,38
12	Pleret	392	29.425	1,33
13	Pundong	383	24.052	1,59
14	Sanden	673	21.742	3,10
15	Sedayu	686	28.507	2,41
16	Sewon	1.414	61.961	2,28
17	Srandakan	576	20.646	2,79

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, 2017.

Data yang digunakan dalam indikator pengangguran adalah jumlah pencari kerja per jumlah angkatan kerja di suatu kecamatan. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Jumlah pengangguran pada suatu wilayah dapat berakibat pada peningkatan angka kemiskinan suatu wilayah. Hubungan keterkaitan ini menjelaskan bahwa masalah kemiskinan suatu wilayah bisa diakibatkan oleh masih tingginya jumlah pengangguran di wilayah tersebut.

Tabel 8. Nilai indeks indikator pengangguran menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,74	Rawan
2	Banguntapan	0,83	Sangat Rawan
3	Bantul	1,00	Sangat Rawan
4	Dlingo	0,00	Sangat Tahan
5	Imogiri	0,24	Tahan
6	Jetis	0,46	Cukup Tahan
7	Kasih	0,64	Agak Rawan
8	Kretek	0,74	Rawan
9	Pajangan	0,17	Tahan
10	Pandak	0,44	Cukup Tahan
11	Piyungan	0,59	Agak Rawan
12	Pleret	0,24	Tahan
13	Pundong	0,33	Cukup Tahan
14	Sanden	0,83	Sangat Rawan
15	Sedayu	0,60	Agak Rawan
16	Sewon	0,56	Agak Rawan
17	Srandakan	0,73	Rawan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 17 ditunjukkan nilai indeks pengangguran menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai yaitu berkisar dari 0-1 dengan penilaian semakin mendekati 0 maka kecamatan tersebut dalam kondisi sangat tahan pangan sedangkan jika semakin mendekati 1 maka kecamatan tersebut dalam kondisi sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini akan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator jumlah pengangguran.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	3	17,65
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	3	17,65
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	4	23,53
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	3	17,65
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	3	17,65
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	1	5,88
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 18 menunjukkan sebaran kriteria kecamatan di Kabupaten Bantul menurut jumlah pengangguran. Hasil olah data menunjukkan 3 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat rawan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sanden. 3 kecamatan tergolong ke dalam kriteria rawan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek dan Kecamatan Srandakan. 4 kecamatan tergolong ke dalam kriteria agak rawan yaitu Kecamatan Kasihan, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Sewon. 3 kecamatan tergolong ke dalam kriteria cukup tahan yaitu Kecamatan Jetis, Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pundong. 3 kecamatan tergolong ke dalam kriteria tahan yaitu Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pleret. Sedangkan hanya 1 kecamatan yang tergolong ke dalam kriteria sangat tahan yaitu Kecamatan Dlingo.

Dilihat dari indikator pengangguran tingkat ketahanan pangan kecamatan di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari hanya 7 kecamatan yang termasuk ke dalam kriteria cukup tahan pangan sampai sangat tahan pangan. Pengangguran masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengetasan kerawanan pangan wilayah Kabupaten Bantul.

4. Indikator Rumah Tangga Tidak Akses Listrik

Infrastruktur merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Listrik merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Akses listrik yang baik dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti digunakan dalam lembaga pendidikan dan pelatihan. Selain itu listrik juga tergolong kebutuhan utama dalam kegiatan usaha pada era sekarang ini.

Tabel 10. Persentase rumah tangga (RT) tidak akses listrik menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah RT tidak akses listrik	Jumlah RT	RT tidak akses listrik (%)
1	Bambanglipuro	46	14.269	0,32
2	Banguntapan	27	33.725	0,08
3	Bantul	43	21.473	0,20
4	Dlingo	13	13.187	0,10
5	Imogiri	51	20.762	0,25
6	Jetis	32	20.393	0,16
7	Kasihan	33	31.225	0,11
8	Kretek	18	10.745	0,17
9	Pajangan	30	10.936	0,27
10	Pandak	44	17.281	0,25
11	Piyungan	27	16.680	0,16
12	Pleret	16	15.393	0,10
13	Pundong	14	12.084	0,12
14	Sanden	54	11.327	0,48
15	Sedayu	30	14.597	0,21
16	Sewon	29	31.689	0,09
17	Srandakan	56	10.532	0,53

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bantul, 2017.

Rumah tangga tidak akses listrik adalah rumah tangga yang tidak terlayani arus listrik baik dari PLN ataupun non PLN. Data yang digunakan dalam indikator rumah tangga tidak akses listrik adalah jumlah rumah tangga tidak akses listrik per jumlah rumah tangga di suatu kecamatan. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Tabel 11. Nilai indeks rumah tangga tidak akses listrik menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,54	Agak Rawan
2	Banguntapan	0,00	Sangat Tahan
3	Bantul	0,27	Tahan
4	Dlingo	0,04	Sangat Tahan
5	Imogiri	0,37	Cukup Tahan
6	Jetis	0,17	Tahan
7	Kasihan	0,06	Sangat Tahan
8	Kretek	0,19	Tahan
9	Pajangan	0,43	Cukup Tahan
10	Pandak	0,39	Cukup Tahan
11	Piyungan	0,18	Tahan
12	Pleret	0,05	Sangat Tahan
13	Pundong	0,08	Sangat Tahan
14	Sanden	0,88	Sangat Rawan
15	Sedayu	0,28	Tahan
16	Sewon	0,03	Sangat Tahan
17	Srandakan	1,00	Sangat Rawan

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel ditunjukkan nilai indeks indikator rumah tangga tidak akses listrik menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai dari 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan tersebut tergolong sangat tahan pangan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut tergolong sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 12. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator rumah tangga tidak akses listrik.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	2	11,76
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	0	0,00
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	1	5,88
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	3	17,65
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	5	29,41
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	6	35,29
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 21 menunjukkan persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator rumah tangga tidak akses listrik di Kabupaten Bantul. Sebagian besar kecamatan tergolong sangat tahan pangan berdasarkan indikator rumah tangga tidak akses listrik. Sebanyak 6 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong dan Kecamatan Sewon. 5 kecamatan tergolong ke dalam kriteria tahan pangan yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kretek, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu. 3 kecamatan termasuk ke dalam kriteria cukup tahan pangan yaitu Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pandak. 1 kecamatan termasuk ke dalam kriteria agak rawan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro. Sedangkan 2 kecamatan termasuk ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan.

Dilihat dari indikator rumah tangga tidak akses listrik tingkat ketahanan pangan kecamatan di Kabupaten Bantul masih tergolong tinggi. Hal ini bisa dilihat dari hanya 3 kecamatan yang termasuk ke dalam kriteria agak rawan pangan sampai sangat rawan pangan. Sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul tergolong ke dalam tingkat ketahanan pangan baik dari sisi indikator rumah tangga tidak akses listrik.

5. Indikator Rumah Berdinding Bambu

Rumah adalah aset kepemilikan yang dimiliki oleh rumah tangga. Kondisi ekonomi penduduk memungkinkan terlihat dari kondisi rumah sebagai aset kepemilikan. Sehingga indikator rumah berdinding bambu digunakan untuk melihat kondisi ekonomi penduduk yang mana berkaitan dengan kemiskinan.

Tabel 13. Persentase rumah tangga (RT) berdinding bambu menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah RT berdinding bambu	Jumlah RT	RT berdinding bambu (%)
1	Bambanglipuro	223	14.269	1,56
2	Banguntapan	305	33.725	0,90
3	Bantul	147	21.473	0,68
4	Dlingo	1136	13.187	8,61
5	Imogiri	1727	20.762	8,32
6	Jetis	227	20.393	1,11
7	Kasihan	426	31.225	1,36
8	Kretek	64	10.745	0,60
9	Pajangan	359	10.936	3,28
10	Pandak	175	17.281	1,01
11	Piyungan	199	16.680	1,19
12	Pleret	569	15.393	3,70
13	Pundong	146	12.084	1,21
14	Sanden	34	11.327	0,30
15	Sedayu	179	14.597	1,23
16	Sewon	411	31.689	1,30
17	Srandakan	24	10.532	0,23

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bantul diolah, 2017.

Perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah rumah tangga berdinding bambu dengan jumlah rumah tangga di suatu wilayah. Data yang digunakan dalam indikator rumah tangga berdinding bambu adalah jumlah rumah tangga berdinding bambu per jumlah rumah tangga di suatu kecamatan. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Indikator rumah berdinding bambu mempunyai keterkaitan hubungan dengan indikator kepala keluarga (KK) miskin. Secara tidak langsung rumah dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu rumah tangga. Rumah berdinding bambu dapat mencerminkan kondisi sumberdaya ekonomi yang rendah sehingga memungkinkan mengalami kendala dalam mengakses pangan. Selain itu indikator rumah berdinding bambu juga berkaitan dengan indikator balita status gizi buruk. Hal ini karena kemampuan ekonomi suatu rumah tangga bisa terlihat dari status gizi balitanya.

Tabel 14. Nilai indeks rumah tangga berdinding bambu menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,16	Sangat Tahan
2	Banguntapan	0,08	Sangat Tahan
3	Bantul	0,05	Sangat Tahan
4	Dlingo	1,00	Sangat Rawan
5	Imogiri	0,96	Sangat Rawan
6	Jetis	0,11	Sangat Tahan
7	Kasihan	0,14	Sangat Tahan
8	Kretek	0,04	Sangat Tahan
9	Pajangan	0,36	Cukup Tahan
10	Pandak	0,09	Sangat Tahan
11	Piyungan	0,12	Sangat Tahan
12	Pleret	0,41	Cukup Tahan
13	Pundong	0,12	Sangat Tahan
14	Sanden	0,01	Sangat Tahan
15	Sedayu	0,12	Sangat Tahan
16	Sewon	0,13	Sangat Tahan
17	Srandakan	0,00	Sangat Tahan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 23 dapat diketahui besar nilai indeks indikator rumah berdinding bambu menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai dari 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan tersebut tergolong sangat tahan pangan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut tergolong sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 15. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator rumah berdinding bambu.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	2	11,76
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	0	0,00
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	0	0,00
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	2	11,76
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	0	0,00
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	13	76,47
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Berdasarkan tabel 24 sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul sudah termasuk ke dalam kriteria sangat tahan pangan menurut indikator rumah berdinding bambu. Sebanyak 13 kecamatan yang termasuk ke dalam kriteria sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Srandakan. 2 kecamatan yang termasuk ke dalam kriteria cukup tahan pangan yaitu Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pleret. 2 kecamatan yang termasuk ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri.

Jika dilihat dari letak geografis kecamatan dengan status sangat rawan terletak di perbukitan bagian timur dimana daerah perbukitan ini termasuk jauh dari pusat ibukota kabupaten sedangkan pusat kegiatan pembangunan ekonomi umumnya tersentral pada daerah pusat ibukota. Hal ini bisa jadi salah satu alasan mengapa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki nilai indikator rumah berdinding bambu yang tinggi.

6. Indikator Penduduk >15 tahun Tidak Tamat SD

Indikator penduduk >15 tahun yang tidak tamat sekolah dasar dapat menggambarkan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Semakin besar persentasenya maka dapat dikatakan tingkat pendidikan di wilayah tersebut tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Tingkat pendapatan rendah akibat tingkat pendidikan yang rendah menjadikan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan secara cukup.

Tabel 16. Persentase penduduk > 15 tahun yang tidak tamat SD menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah penduduk >15 tahun tidak tamat SD	Jumlah penduduk usia 15-54 tahun	Penduduk > 15 tahun tidak tamat SD (%)
1	Bambanglipuro	380	21590	1,76
2	Banguntapan	996	90.630	1,10
3	Bantul	457	37.470	1,22
4	Dlingo	225	20.400	1,10
5	Imogiri	299	33.980	0,88
6	Jetis	642	32.430	1,98
7	Kasihan	660	79.570	0,83
8	Kretek	208	18.360	1,13
9	Pajangan	900	20.920	4,30
10	Pandak	397	27.450	1,45
11	Piyungan	935	32.210	2,90
12	Pleret	506	27.910	1,81
13	Pundong	359	18.360	1,96
14	Sanden	266	16.160	1,65
15	Sedayu	311	27.230	1,14
16	Sewon	1.102	72.230	1,53
17	Srandakan	539	16.630	3,24

Sumber: BPS Kabupaten Bantul diolah, 2017

Perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah penduduk berusia > 15 tahun yang tidak tamat SD dengan jumlah penduduk usia 15-54 tahun di suatu wilayah. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Indikator penduduk >15 tahun yang tidak tamat SD mempunyai keterkaitan hubungan dengan indikator kepala keluarga (KK) miskin. Hal ini dikarenakan penduduk usia >15 tahun yang tidak tamat SD berpeluang besar mengalami kendala dalam akses kegiatan mata pencaharian yang bisa mengakibatkan rendahnya daya beli sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Tabel 17. Nilai indeks penduduk >15 tahun yang tidak tamat SD menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,27	Tahan
2	Banguntapan	0,08	Sangat Tahan
3	Bantul	0,11	Sangat Tahan
4	Dlingo	0,08	Sangat Tahan
5	Imogiri	0,01	Sangat Tahan
6	Jetis	0,33	Cukup Tahan
7	Kasihan	0,00	Sangat Tahan
8	Kretek	0,09	Sangat Tahan
9	Pajangan	1,00	Sangat Rawan
10	Pandak	0,18	Tahan
11	Piyungan	0,60	Agak Rawan
12	Pleret	0,28	Tahan
13	Pundong	0,32	Cukup Tahan
14	Sanden	0,24	Tahan
15	Sedayu	0,09	Sangat Tahan
16	Sewon	0,20	Tahan
17	Srandakan	0,69	Rawan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 26 dapat diketahui nilai indeks indikator penduduk >15 tahun yang tidak tamat SD menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai dari 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan tersebut tergolong sangat tahan pangan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut tergolong sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 18. Persentase dan kriteria kecamatan berdasarkan indikator penduduk >15 tahun yang tidak tamat SD.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	1	5,88
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	1	5,88
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	1	5,88
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	2	11,76
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	5	29,41
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	7	41,18
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data

Hasil analisis data pada tabel 27 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di atas 15 tahun tergolong baik. Sejumlah 7 kecamatan di Kabupaten Bantul tergolong ke dalam kriteria sangat tahan pangan berdasarkan indikator ini yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek dan Kecamatan Sedayu. 5 kecamatan tergolong ke dalam kriteria tahan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Sewon. 2 kecamatan tergolong ke dalam kriteria cukup tahan pangan yaitu Kecamatan Jetis dan Kecamatan Pundong. 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria agak rawan pangan yaitu Kecamatan Piyungan. 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria rawan yaitu Kecamatan Srandakan dan 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Pajangan.

7. Indikator Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok subsistem pemanfaatan pangan. Untuk mengetahui apakah balita memiliki berat badan kurang atau tidak maka harus dilakukan pengukuran berat badan dan pencatatan umur dalam bulan. Angka ini kemudian dibandingkan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh badan “National Centre for Health Statistics, Centers for Disease Control, USA (NCHS standard). (Dewan Ketahanan Pangan, 2009)

Tabel 19. Persentase balita status gizi buruk menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah balita status gizi buruk	Jumlah balita	Balita status gizi buruk (%)
1	Bambanglipuro	15	2.358	0,64
2	Banguntapan	16	8.018	0,20
3	Bantul	11	3.772	0,29
4	Dlingo	9	2.220	0,41
5	Imogiri	10	3.899	0,26
6	Jetis	6	3.514	0,17
7	Kasih	20	6.560	0,30
8	Kretek	10	1.715	0,58
9	Pajangan	10	2.447	0,41
10	Pandak	20	2.861	0,70
11	Piyungan	10	3.498	0,29
12	Pleret	8	3.254	0,25
13	Pundong	19	2.215	0,86
14	Sanden	2	1.492	0,13
15	Sedayu	16	3.107	0,51
16	Sewon	15	6.138	0,24
17	Srandakan	5	1.810	0,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul diolah, 2017.

Perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah balita status gizi buruk dengan jumlah balita di suatu wilayah. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Indikator balita dengan status gizi buruk memiliki keterkaitan hubungan dengan indikator kepala keluarga (KK) miskin. Hal ini karena kepala keluarga miskin diartikan sebagai pihak yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan kendala sumberdaya ekonomi atau daya beli rendah. Kemampuan atau daya beli yang rendah bisa mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan gizi yang baik seimbang yang bisa tercermin dari status gizi balita.

Tabel 20. Nilai indeks indikator balita status gizi buruk menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,69	Rawan
2	Banguntapan	0,09	Sangat Tahan
3	Bantul	0,22	Tahan
4	Dlingo	0,37	Cukup Tahan
5	Imogiri	0,17	Tahan
6	Jetis	0,05	Sangat Tahan
7	Kasihan	0,24	Tahan
8	Kretek	0,62	Agak Rawan
9	Pajangan	0,38	Cukup Tahan
10	Pandak	0,78	Rawan
11	Piyungan	0,21	Tahan
12	Pleret	0,15	Sangat Tahan
13	Pundong	1,00	Sangat Rawan
14	Sanden	0,00	Sangat Tahan
15	Sedayu	0,53	Agak Rawan
16	Sewon	0,15	Sangat Tahan
17	Srandakan	0,20	Tahan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 29 dapat diketahui nilai indeks indikator balita gizi buruk menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai dari 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan tersebut tergolong sangat tahan pangan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut tergolong sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 21. Persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator balita gizi buruk.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	1	5,88
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	2	11,76
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	2	11,76
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	2	11,76
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	5	29,41
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	5	29,41
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Hasil olah data pada tabel 30 menunjukkan sebaran kriteria kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator balita gizi buruk. Sejumlah 5 kecamatan di Kabupaten Bantul tergolong ke dalam kriteria sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Sewon. 5 kecamatan tergolong ke dalam kriteria tahan pangan yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Srandakan. 2 kecamatan tergolong ke dalam kriteria cukup tahan pangan yaitu Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan. 2 kecamatan tergolong ke dalam kriteria agak rawan pangan yaitu Kecamatan Kretek dan Kecamatan Sedayu. 2 kecamatan tergolong ke dalam kriteria rawan yaitu Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pandak. 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Pundong.

Pada sebuah penelitian disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi menyarankan bahwa pemberian bantuan berbasis makanan secara signifikan lebih besar meningkatkan status kesehatan gizi rumah tangga, namun hal ini bersifat sementara sehingga perlu diupayakan hal lain yang dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi untuk jangka panjang (Doocy, Leidman, Aung, & Kirsch, 2013).

8. Indikator Rumah Tangga Tidak Akses Air Bersih

Salah satu indikator yang bisa digunakan pada aspek pemanfaatan pangan adalah status gizi balita. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi status gizi balita di antaranya situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, tingkat pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap pelayanan kesehatan dan akses terhadap air bersih.

Persentase rumah tangga tidak akses air bersih yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum yang berasal dari leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung. Akses terhadap air bersih memegang peranan penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan menurunkan angka kesakitan penduduk sehingga akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya.

Tabel 22. Persentase rumah tangga tidak akses air bersih menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah RT tidak akses air bersih	Jumlah RT	RT tidak akses air bersih (%)
1	Bambanglipuro	320	14.269	2,24
2	Banguntapan	452	33.725	1,34
3	Bantul	323	21.473	1,50
4	Dlingo	912	13.187	6,92
5	Imogiri	1.038	20.762	5,00
6	Jetis	417	20.393	2,04
7	Kasih	1.071	31.225	3,43
8	Kretek	70	10.745	0,65
9	Pajangan	1.826	10.936	16,70
10	Pandak	640	17.281	3,70
11	Piyungan	836	16.680	5,01
12	Pleret	483	15.393	3,14
13	Pundong	414	12.084	3,43
14	Sanden	454	11.327	4,01
15	Sedayu	563	14.597	3,86
16	Sewon	370	31.689	1,17
17	Srandakan	190	10.532	1,80

Sumber: BPS Kabupaten Bantul diolah, 2017.

Perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah balita status gizi buruk dengan jumlah balita di suatu wilayah. Rasio perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam satuan persentase (%).

Tabel 23. Nilai indeks indikator rumah tangga tidak akses air bersih menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,10	Sangat Tahan
2	Banguntapan	0,04	Sangat Tahan
3	Bantul	0,05	Sangat Tahan
4	Dlingo	0,39	Cukup Tahan
5	Imogiri	0,27	Tahan
6	Jetis	0,09	Sangat Tahan
7	Kasihan	0,17	Tahan
8	Kretek	0,00	Sangat Tahan
9	Pajangan	1,00	Sangat Rawan
10	Pandak	0,19	Tahan
11	Piyungan	0,27	Tahan
12	Pleret	0,15	Sangat Tahan
13	Pundong	0,17	Tahan
14	Sanden	0,21	Tahan
15	Sedayu	0,20	Tahan
16	Sewon	0,03	Sangat Tahan
17	Srandakan	0,07	Sangat Tahan

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 32 dapat diketahui nilai indeks indikator rumah tangga tidak akses air bersih menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Rentang nilai dari 0-1 dengan penilaian jika nilai indeks mendekati 0 maka kecamatan tersebut tergolong sangat tahan pangan dan jika nilai indeks mendekati 1 maka kecamatan tersebut tergolong sangat rawan pangan. Banyaknya persentase dan kriteria kecamatan menurut indikator ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 24. Persentase dan kriteria kecamatan berdasarkan indikator rumah tangga tidak akses air bersih.

Kriteria	Ketahanan pangan		Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	1	5,88
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	0	0,00
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	0	0,00
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	1	5,88
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	7	41,18
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	8	47,06
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 33 menunjukkan hasil olah data sebaran kriteria kecamatan di Kabupaten Bantul menurut indikator rumah tangga tidak akses air bersih. Berdasarkan indikator rumah tangga tidak akses air bersih, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul dalam kondisi tahan pangan. Sebanyak 8 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat tahan pangan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Srandakan. 7 Kecamatan tergolong ke dalam kriteria tahan pangan yaitu Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Sedayu. 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria cukup tahan pangan yaitu Kecamatan Dlingo. 1 kecamatan tergolong ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu Kecamatan Pajangan.

Melihat pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul wilayah-wilayah yang kerap mengalami masalah akses air bersih adalah wilayah di kawasan perbukitan barat dan timur (Nadjib, 2018). Adapun pada tahun 2018 dua desa di Kecamatan Pajangan yaitu Desa Guwosari dan Desa Triwidadi kerap melaporkan kendala masyarakat dalam mengakses air bersih. Sumur-sumur milik warga kerap mengering dan warga juga kesulitan untuk mencari sumber mata air bersih karena kendala medan yang jauh. Kendala semakin dirasakan terlebih jika sudah memasuki musim kemarau. Namun BPBD Bantul mengatakan bahwa bantuan untuk warga tidak lagi dalam pemberian air namun diarahkan pada pembuatan bak penampungan dan sumur bor. Hal ini bisa dijadikan prioritas penanganan masalah warga dalam mengakses air bersih.

Indeks Ketahanan Pangan Komposit

Perhitungan indeks ketahanan pangan komposit dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan komposit dibuat dengan menggunakan 8 indikator, yaitu: (1) Rasio konsumsi normatif, (2) Persentase kepala keluarga miskin, (3) Persentase pengangguran, (4) Persentase rumah tangga tidak akses listrik, (5) Persentase rumah tangga berdinding bambu, (6) Persentase penduduk di atas 15 tahun yang tidak tamat SD, (7) Persentase status balita gizi buruk dan (8) Persentase rumah tangga tidak akses air bersih. Kondisi status ketahanan pangan di tingkat kecamatan ditentukan dari skor perhitungan indeks komposit (Dewan Ketahanan Pangan, 2009).

Tabel 25. Nilai indeks ketahanan pangan komposit menurut kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2017.

No	Kecamatan	Nilai indeks	Status kondisi
1	Bambanglipuro	0,46	Cukup Tahan
2	Banguntapan	0,18	Tahan
3	Bantul	0,30	Tahan
4	Dlingo	0,37	Cukup Tahan
5	Imogiri	0,36	Cukup Tahan
6	Jetis	0,25	Tahan
7	Kasihan	0,21	Tahan
8	Kretek	0,37	Cukup Tahan
9	Pajangan	0,62	Agak Rawan
10	Pandak	0,40	Cukup Tahan
11	Piyungan	0,33	Cukup Tahan
12	Pleret	0,16	Tahan
13	Pundong	0,42	Cukup Tahan
14	Sanden	0,42	Cukup Tahan
15	Sedayu	0,32	Cukup Tahan
16	Sewon	0,19	Tahan
17	Srandakan	0,57	Agak Rawan

Sumber: Hasil olah data.

Hasil olah data pada tabel 34 menunjukkan besar nilai indeks ketahanan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bantul. Nilai indeks komposit memiliki retang 0-1 dengan penilaian semakin mendekati nilai 0 maka kecamatan tersebut

masuk ke dalam kriteria sangat tahan pangan sedangkan sebaliknya jika nilai indeks komposit semakin mendekati 1 maka kecamatan tersebut masuk ke dalam kriteria sangat rawan pangan. Secara ringkas kondisi ketahanan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam tabel 35.

Tabel 26. Persentase dan kriteria kecamatan berdasarkan indikator ketahanan pangan komposit di Kabupaten Bantul tahun 2017.

Ketahanan pangan			Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
Kriteria	Prioritas	Range		
Sangat rawan	1	$\geq 0,80$	0	0,00
Rawan	2	$0,64 - < 0,80$	0	0,00
Agak rawan	3	$0,48 - < 0,64$	2	11,76
Cukup Tahan	4	$0,32 - < 0,48$	9	52,94
Tahan	5	$0,16 - < 0,32$	6	35,29
Sangat tahan	6	$0 - < 0,16$	0	0,00
Jumlah			17	100

Sumber: Hasil olah data.

Hasil olah data pada tabel 35 menunjukkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantul kondisi ketahanan pangannya baik dengan status ketahanan cukup tahan pangan atau dalam tingkat penanganan proritas 4.

Sebanyak 2 kecamatan yang memiliki status agak rawan pangan adalah Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan. Pada Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan terdapat beberapa indikator dengan status sangat rawan pangan, yaitu indikator rasio konsumsi normatif, indikator kepala keluarga (KK) miskin, indikator rumah tangga (RT) tidak akses listrik, indikator penduduk > 15 tahun tidak tamat SD dan indikator rumah tangga (RT) tidak akses air bersih. Jika melihat kondisi geografis kedua kecamatan ini, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan merupakan kecamatan yang berlokasi di dataran rendah dengan tipe iklim yang memiliki durasi musim kering yang lebih panjang sehingga hujan tidak mengimbangi kekeringan. Selain itu pada indikator penduduk >15 tahun

tidak tamat SD, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan merupakan kecamatan dengan persentase penduduk > 15 tahun tidak tamat SD yang tinggi yaitu 3-4% dari keseluruhan penduduk di setiap kecamatan (BPS, 2017). Tingkat pendidikan yang rendah ini juga ditambah dengan persentase kepala keluarga (KK) miskin yang tinggi di Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan yaitu 14-15% dari total kepala keluarga (Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2017). Pada indikator rasio konsumsi normatif Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Srandakan merupakan dua kecamatan yang memiliki produksi sereal dan umbi-umbian terendah dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul (Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2017).

Indikator yang digunakan dalam menganalisis kondisi ketahanan pangan tingkat kecamatan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan strategi dan kebijakannya (Hapsari & Rudiarto, 2017). Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk kecamatan-kecamatan dengan status agak rawan ialah peningkatan ketersediaan pangan dalam daerah, pengembangan produksi pangan alternatif berbasis sumberdaya lokal, peningkatan kelancaran distribusi pangan, peningkatan akses ekonomi masyarakat, perbaikan status gizi masyarakat dan penanganan masalah akses air bersih bagi masyarakat. Selain itu beberapa program pemerintah seperti contoh program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) memiliki tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan yang mana kemiskinan merupakan hal yang kerap melandasi permasalahan kerawanan pangan baik tingkat rumah tangga maupun tingkat wilayah (Darwis, Supriyati, & Rusastra, 2016)

Sebanyak 9 kecamatan yang memiliki status cukup tahan pangan adalah Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Sedayu. Pada kecamatan-kecamatan ini terdapat beberapa indikator yang masuk ke dalam kriteria sangat rawan pangan yaitu indikator kepala keluarga (KK) miskin, indikator pengangguran dan indikator rumah tangga (RT) berdinding bambu. Jika melihat jumlah kepala keluarga (KK) miskin di kecamatan-kecamatan tersebut, persentase kepala keluarga (KK) miskin berkisar antara 9-16% dari total kepala keluarga (KK) (Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2017). Pada indikator pengangguran kecamatan-kecamatan tersebut memiliki persentase pengangguran 1-3% dari total angkatan kerja. Pada indikator rumah tangga (RT) berdinding bambu kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan-kecamatan yang mempunyai persentase rumah tangga (RT) berdinding bambu paling tinggi yaitu berkisar 1-8% dimana kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah rumah tangga (RT) berdinding bambu adalah Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri.

Sebanyak 6 kecamatan yang memiliki status tahan pangan berkelompok terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Bantul mulai dari pusat ibukota yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Banguntapan. Bila dihubungkan dengan wilayah pusat pemerintahan dan perkotaan, masyarakat pada kecamatan-kecamatan tersebut mayoritas bekerja pada sektor di luar pertanian.

B. Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Bantul Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan

Pengelompokan objek (kecamatan) ke dalam sebuah kelompok yang anggotanya mempunyai kemiripan satu sama lain namun memiliki perbedaan yang jelas dengan objek-objek di klaster lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan mengelompokkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul. Pengelompokan dilakukan berdasarkan indikator-indikator ketahanan pangan pada masing-masing kecamatan. Analisis klaster dalam penelitian ini menggunakan metode klaster hirarki Ward.

Pada penelitian ini jumlah klaster yang digunakan adalah tiga dengan pertimbangan banyaknya subsistem ketahanan pangan yang berjumlah tiga (ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan). Setelah analisis klaster dilakukan dan anggota untuk masing-masing klaster sudah terbentuk maka selanjutnya adalah deskripsi kesamaan indikator dalam masing-masing klaster. Berdasarkan analisis klaster berdasarkan indikator ketahanan pangan, maka pengelompokan dapat digambarkan pada tabel 37.

Tabel 27. Cluster membership.

Case Number	Kecamatan	Cluster
1	Bambanglipuro	1
2	Banguntapan	2
3	Bantul	2
4	Dlingo	1
5	Imogiri	1
6	Jetis	2
7	Kasihan	2
8	Kretek	1
9	Pajangan	3
10	Pandak	1
11	Piyungan	2
12	Pleret	2
13	Pundong	1
14	Sanden	3
15	Sedayu	1
16	Sewon	2
17	Srandakan	3

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan hasil analisis data 17 kecamatan di Kabupaten Bantul dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Banyak anggota kelompok untuk setiap kelompok yang sudah terbentuk disajikan dalam tabel 37. Adapun hasil pengelompokkan juga disajikan dalam bentuk dendogram seperti terlampir pada Lampiran 2.

Tabel 28. Pengelompokkan kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator ketahanan pangan

Klaster	Jumlah Kecamatan	Nama Kecamatan
1	7	Bambanglipuro, Dlingo, Imogiri, Kretek, Pandak, Pundong dan Sedayu
2	7	Banguntapan, Bantul, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pleret dan Sewon
3	3	Pajangan, Sanden dan Srandakan
3	17	Jumlah

Sumber: Hasil olah data.

Pada tabel 37 dapat dikatakan terdapat 3 klaster kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator ketahanan pangan. Klaster 1 dengan jumlah anggota

7 kecamatan yaitu Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pundong dan Kecamatan Sedayu. Klaster 2 dengan jumlah anggota 7 kecamatan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Sewon. Klaster 3 dengan jumlah anggota 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan.

Setelah proses pengelompokan selanjutnya adalah deskripsi persamaan indikator yang dimiliki oleh masing-masing klaster yang sudah terbentuk.

1. Klaster 1

Pada klaster 1 anggota kecamatan berjumlah tujuh kecamatan dengan kesamaan indikator yang dimiliki yaitu persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi, persentase penduduk > 15 tahun yang tidak tamat SD rendah dan persentase balita status gizi buruk tinggi. Kecamatan yang termasuk ke dalam klaster ini adalah Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pundong dan Kecamatan Sedayu.

Pada klaster ini kesamaan indikator yang dimiliki adalah persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi dan persentase balita status gizi buruk yang tinggi. Hubungan yang saling berkaitan antar kedua indikator dalam klaster ini adalah masyarakat yang tergolong miskin akan mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, kendala dalam pemenuhan kebutuhan salah satunya berakibat pada status gizi yang buruk. Seperti dikatakan oleh Abriyani dan Prabowo (2011) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi masyarakat tersebut,

semakin banyak jumlah penduduk miskin maka semakin banyak pula anak balita dengan status gizi buruk. Abriyani dan Prabowo (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara tingkat kesejahteraan keluarga dengan status gizi balita di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, hasilnya menyebutkan secara statistik terdapat hubungan antara tingkat kesejahteraan keluarga dengan status gizi balita. Keeratan hubungan antara tingkat kesejahteraan keluarga dengan status gizi balita bernilai positif yang artinya semakin baik tingkat kesejahteraan keluarga maka status gizi balita akan semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Dalam rangka upaya pengentasan kerawanan pangan di wilayah klaster ini arah kebijakan yang bisa diupayakan adalah meningkatkan kesejahteraan dengan pendekatan kesehatan gizi, seperti peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan terutama untuk pelayanan gizi balita (Saputra & Nurriszka, 2013), peningkatan komunikasi informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat dan intervensi langsung kepada sasaran melalui diversifikasi bantuan yang bukan saja terhadap karbohidrat tapi juga mencakup protein dan vitamin seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), distribusi vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium (Almatsier, 2002).

2. Klaster 2

Pada klaster 2 anggota kecamatan berjumlah tujuh kecamatan dengan kesamaan indikator yang dimiliki yaitu rasio konsumsi normatif tinggi dan persentase pengangguran yang tinggi. Kecamatan yang termasuk ke dalam klaster ini adalah Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Sewon.

Pada klaster ini kesamaan indikator yang dimiliki adalah rasio konsumsi normatif tinggi dan persentase pengangguran yang tinggi, artinya kecamatan-kecamatan dalam klaster ini merupakan kecamatan yang jika dilihat dari kemampuan produksi pangan sereal merupakan wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya tetapi kecamatan dalam klaster ini juga memiliki persentase penduduk tidak bekerja (pengangguran) yang masih tinggi. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada kecamatan-kecamatan yang masuk dalam klaster ini sektor pertanian bukan merupakan sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia meliputi berbagai aspek, baik menyangkut masalah penganggura, kualitas, upah, jaminan sosial dan lain-lain. Menurut Setiawan (2016) di tengah berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut, sektor pertanian merupakan sektor yang masih memegang peran yang sangat strategis bagi ketenagakerjaan Indonesia. Setiawan (2016) mengatakan bahwa pekerja Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada profesi petani. Namun masih tingginya daya serap sektor pertanian tidak disertai dengan upaya yang memadai dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif untuk pengembangan sektor pertanian itu sendiri. Petani dan sektor pertanian masih ditempatkan pada posisi kecil. Kebijakan pemerintah cenderung bertentangan dengan keinginan petani seperti impor beras, gula dan komoditi lain yang mencerminkan pertentangan antara keinginan petani dan pemerintah.

Selain itu permasalahan lain terkait ketenagakerjaan dalam sektor pertanian yaitu perubahan struktur demografi dimana petani Indonesia berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin berkurang. Susilowati (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa

tenaga kerja pertanian indonesia didominasi tenaga kerja usia tua lebih dari 40 tahun, tenaga kerja usia muda jumlahnya tidak banyak dan cenderung merosot dalam kurun waktu 2003-2013. Sementara di sisi lain, pemuda yang bekerja pada sektor nonpertanian meningkat dalam kurun waktu 2003-2013. Berbagai alasan penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian terutama ialah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang memberikan imbalan memadai. Bagi anak-anak muda sektor pertanian makin kehilangan daya tarik. Bukan sekedar karena secara ekonomi sektor pertanian makin tidak menjanjikan, tetapi keengganan anak-anak muda untuk bertani sesungguhnya juga dipengaruhi oleh subkultur baru di era perkembangan digital saat ini. Jika tenaga kerja muda yang baru memulai usaha di sektor pertanian, tenaga kerja muda memiliki kemampuan finansial terbatas untuk kepemilikan lahan luas, kecuali mereka memperoleh warisan atau mengerjakan lahan milik orang tua.

Menurunnya persentase tenaga kerja muda dan meningkatnya persentase tenaga kerja usia tua pada sektor pertanian secara tidak langsung menunjukkan ketidakcocokan antara jenis kesempatan kerja yang diinginkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakcocokan keterampilan diartikan sebagai tenaga kerja dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Kaitannya dengan kualitas pendidikan tenaga kerja muda di sektor pertanian, semakin tinggi pendidikan tenaga kerja muda maka mereka akan semakin selektif dalam memanfaatkan kesempatan kerja. Sepanjang sektor pertanian belum mampu menumbuhkan citra bahwa pekerjaan sektor pertanian juga dapat memberikan prospek pendapatan dan

kebanggaan yang baik maka sektor pertanian tetap akan ditinggalkan oleh tenaga kerja muda yang berpendidikan tinggi.

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah seperti ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang ada. Jika melihat tenaga kerja profesional, di Kabupaten Bantul terdapat 24 perguruan tinggi yang setiap tahunnya mencetak calon pekerja. Jumlah tenaga kerja yang semakin banyak namun tidak diimbangi dengan jumlah pekerjaan yang sama tentunya akan mengakibatkan ketimpangan sehingga tidak memungkinkan semua tenaga kerja terserap.

Untuk kecamatan-kecamatan yang ada dalam klaster ini arah kebijakan yang dapat diterapkan merupakan kebijakan yang mengarah pada upaya menarik tenaga kerja khususnya kaum muda ke sektor pertanian, seperti pengembangan agroindustri, insentif khususnya dalam akses memperoleh permodalan, kemudahan perizinan untuk berwiraswasta di bidang agroindustri dan inovasi teknologi *urban farming*.

3. Klaster 3

Pada klaster 3 anggota kecamatan berjumlah tiga kecamatan dengan kesamaan indikator yang dimiliki yaitu persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi dan persentase rumah tangga (RT) tidak akses listrik tinggi. Kecamatan yang termasuk ke dalam klaster ini adalah Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan.

Pada klaster ini kesamaan indikator yang dimiliki adalah persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi dan persentase rumah tangga (RT) tidak akses listrik

tinggi. Hubungan yang saling berkaitan antar kedua indikator dalam klaster ini adalah sebuah keluarga yang tergolong miskin tentu memiliki peluang besar mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan pangan dan fasilitas kehidupan lain. Menurut Suryawati (2005) tingkat kemiskinan di masyarakat disebabkan oleh diantaranya keterbatasan aset, dimana salah satu keterbatasan aset yang dimaksud adalah keterbatasan fisik aset yaitu minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. Selain itu BPS memberikan 14 kriteria yang menjadikan sebagai indikator keluarga miskin yang mana salah satunya adalah sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Merujuk pada penelitian Firdaus, Apriliani dan Wijaya (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan jenis pengeluaran rumah tangga. Menurutnya besarnya nilai pengeluaran non pangan yang lebih kecil dari pengeluaran pangan menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam penelitiannya pengeluaran rumah tangga dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Salah satu kelompok barang yang termasuk ke dalam jenis pengeluaran non pangan adalah fasilitas rumah tangga seperti air dan listrik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrianto, Qurniati dan Setiawan (2016) yang mengatakan fasilitas rumah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin menurun fasilitas rumah yang dimiliki maka akan meningkatkan kemiskinan. Umumnya pendapatan rumah tangga lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan untuk fasilitas dalam suatu rumah.

Prawoto (2009) mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar. Maka dalam rangka pengentasan kerawanan pangan di wilayah klaster ini arah kebijakan yang bisa diupayakan adalah meningkatkan kesejahteraan yang berfokus pada peningkatan kemampuan beli masyarakat seperti peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan atau pelatihan keterampilan agar mudah mengakses pekerjaan dan perluasan industri ekonomi kreatif dimana industri ekonomi kreatif akan membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja. Meningkatkan tingkat sumberdaya manusia dapat meningkatkan kesempatan individu untuk mengakses pekerjaan sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kemampuan beli individu tersebut. Perluasan industri ekonomi kreatif memberikan kesempatan masyarakat yang memiliki kemampuan berkreasi dalam menghasilkan produk atau jasa bernilai jual dan memberikan kesempatan angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan untuk bisa bekerja.

Secara ringkas tabel 38 menunjukkan kesamaan indikator dan saran arah kebijakan untuk masing-masing klaster.

Tabel 29. Klaster, kesamaan indikator, anggota kecamatan dan saran kebijakan.

Klaster	Kesamaan Indikator	Kecamatan	Kebijakan
1	1. Persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi	Bambanglipuro, Dlingo, Imogiri, Kretek, Pandak, Pundong dan Sedayu	Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat, dan intervensi langsung kepada sasaran: contohnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
	2. Persentase penduduk > 15 tahun yang tidak tamat SD rendah		
	3. Persentase balita status gizi buruk tinggi.		
2	1. Rasio konsumsi normatif tinggi	Banguntapan, Bantul, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pleret dan Sewon	Pengembangan agroindustri, insentif dalam akses memperoleh permodalan, per mudahan perizinan untuk berwiraswasta di bidang agroindustri dan inovasi teknologi <i>urban farming</i> .
	2. Persentase pengangguran yang tinggi.		
3	1. Persentase kepala keluarga (KK) miskin tinggi	Pajangan, Sanden dan Srandakan.	Peningkatan kemampuan beli masyarakat seperti peningkatan sumberdaya manusia, induksi ekonomi kreatif.
	2. Persentase rumah tangga (RT) tidak akses listrik tinggi		